

Evaluasi Empat Tahun Pakto

Oleh : Dahlan M. Sualaksana

Pendahuluan

Sejak dilaksanakannya Paket Kebijakan Oktober 27, 1988 dan paket pendukung lainnya, perekonomian Indonesia telah mengalami masa boom dan kemudian meningkatnya suhu perekonomian (overheating) dalam tahun 1990. Meningkatnya suhu perekonomian ini didorong oleh meningkatnya kegiatan ekonomi di dalam negeri, terutama investasi. Pesatnya pertumbuhan permintaan dalam negeri telah memberikan tekanan pada laju inflasi dan cenderung untuk mendorong pertumbuhan impor barang dan jasa sehingga berakibat meningkatnya defisit transaksi berjalan.

Dalam rangka memelihara stabilitas moneter sambil terus mendorong pertumbuhan ekonomi, otoritas moneter telah mengambil kebijakan moneter ketat (Tight Money Policy/TMP). TMP yang telah berhasil menekan laju pertumbuhan uang beredar (M1 dan M2) dibarengi dengan keberhasilan kebijakan Pemerintah dalam membentuk surplus keuangan pemerintah telah mampu mengurangi laju pertumbuhan permintaan dalam negeri sehingga tekanan yang lebih berat terhadap laju inflasi dan neraca pembayaran dapat dihindarkan.

Perkembangan Moneter

Dampak Kebijakan Pakto 1988

adalah perkembangan yang pesat di bidang perbankan antara lain tercermin dari perkembangan jumlah bank dan kantor bank sejak tahun 1988. Jumlah bank pada Desember 1988 adalah sebanyak 111 telah meningkat menjadi 216 pada Agustus 1992. (Tabel 1). Sedang jumlah kantor bank meningkat dari 12.335 kantor pada akhir 1988 menjadi 17.256 pada akhir September 1992, termasuk jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada akhir September 1992 berjumlah 8.441 bank (Tabel 2).

Perkembangan yang pesat ini telah membawa dampak meningkatnya persaingan antar bank dan sekaligus meningkatkan jasa pelayanan dan produk perbankan serta jaringan networknya yang berkembang dengan sangat pesat. Dalam pada itu peran beberapa bank pemerintah dan swasta yang besar tampak dominan dalam menentukan tingkat suku bunga deposito dan kredit.

Perkembangan dana perbankan menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi selama tahun 1989-1990, yaitu 45% di tahun 1989 dan 53% di tahun 1990. Sedangkan pertumbuhan sampai dengan bulan Oktober 1992 adalah 22% (tabel 3). Posisi tabungan terus mengalami kenaikan, akhir tahun 1989 sebesar Rp. 5.2 triliun meningkat menjadi Rp. 9.7 triliun pada akhir tahun 1990, pada tahun 1991 meningkat lagi mencapai Rp. 15.6 triliun, peningkatan ini terus berlanjut

*) Drs. Dahlan M Sualaksana, MPA., adalah Juru Bicara dan Direktur Muda Bank Indonesia.

**) Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Nasional Prospek Perbankan Pasca UU No. 7 Tahun 1992, yang diselenggarakan oleh Fak. Ekonomi UII-ISEI Yogyakarta, 17 Desember 1992.

sehingga pada bulan Oktober 1992 mencapai Rp. 23 triliun. Demikian pula dengan posisi deposito berjangka, pada tahun 1989 sebesar Rp. 34 triliun, tahun 1990 mencapai Rp. 54 triliun, pada akhir tahun 1991 mencapai Rp. 58 triliun dan akhir Oktober 1992 telah mencapai Rp. 66 triliun (Tabel 4).

Keberhasilan dalam mobilisasi dana masyarakat telah mendorong laju pertumbuhan kredit perbankan dari 34% pada tahun 1988 menjadi 45% di tahun 1989 dan meningkat lagi menjadi 54% pada tahun 1990. Sedangkan posisi pemberian kredit pada tahun 1988 adalah Rp. 44 triliun dan ditahun 1990 telah menjadi Rp. 98 triliun (Tabel 5).

Pangsa bank Pemerintah dalam penghimpunan dana yang pada akhir tahun 1988 mencakup 60% menurun menjadi 46% pada akhir Oktober 1992, sedangkan bank swasta meningkat pangsaanya dari 30% menjadi 45% dalam periode yang sama (Tabel 6). Dalam pada itu pangsa, dalam pemberian kredit bank milik Pemerintah telah menurun pula dari 67% pada akhir tahun 1988 menjadi 55% pada akhir 1990, dan pangsa bank swasta meningkat dari 25% menjadi 36% pada kurun waktu yang sama. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pangsa pasar, dana maupun kredit, dari kelompok bank pemerintah kepada kelompok bank swasta. Peningkatan peran perbankan swasta ini sejalan dengan perkembangan peranan sektor swasta dalam bidang usaha yang semakin dominan.

Perkembangan di sektor finansial ini juga didukung oleh perkembangan pasar modal yang mulai tampak pesat sejak Agustus tahun 1989. Hal ini tampak dari perkembangan perdagangan saham yang pada bulan Juli 1989 baru mencapai Rp. 24 miliar telah meningkat menjadi Rp. 190

miliar pada bulan Agustus 1989. Pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal terus berkembang dengan pesat sehingga selama tahun 1989 mencapai Rp. 990 miliar, dan mencapai puncaknya dalam tahun 1990 yaitu Rp. 7,3 triliun. Indeks harga saham menunjukkan trend yang meningkat selama tahun 1989 dan 1990. (Tabel 8).

Peningkatan mobilisasi dana masyarakat dan pemberian kredit telah mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi dalam negeri, terutama investasi. Disamping itu pertumbuhan kredit juga telah mendorong pengeluaran masyarakat yang bersifat konsumtif. Pesatnya pertumbuhan permintaan dalam negeri telah memberikan tekanan pada laju inflasi yang mencapai 9,5 % selama tahun 1990 dan 1991 serta cenderung untuk mendorong pertumbuhan impor barang dan jasa sehingga berakibat meningkatnya defisit transaksi berjalan. Kondisi ini telah menyebabkan memanasnya suhu perekonomian Indonesia (overheated).

Sementara itu pertumbuhan ekspor barang dan jasa cenderung menurun karena kelesuan perdagangan internasional terutama karena kesulitan perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia. Meningkatnya laju pertumbuhan impor yang dibarengi dengan penurunan laju pertumbuhan ekspor semakin memperburuk defisit transaksi berjalan. Kondisi ini harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu usaha-usaha pembangunan.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan agar dapat berjalan dengan mantap dan berkesinambungan tanpa kepanasan

(overheating). Diawali dengan Paket Januari 1990 (Pakjan 90) yang mengatur tentang pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia sehingga berdampak mengurangi jumlah uang beredar. Disamping itu sejak Juni 1990 hingga April 1991 otoritas moneter mengambil tindakan Kebijakan Uang Ketat (Tight Monetary Policy/TMP) sebagai salah satu usaha untuk menyejukkan suhu perekonomian.

Dalam rangka pelaksanaan TMP sejak Juni 1990 hingga April 1991 otoritas moneter menaikkan COR (Cut Off Rate) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari yang semula pada Mei 1990 hanya 11,11% - 15,5% menjadi 15,75% - 18% pada Juni 1990. COR SBI tersebut kemudian secara bertahap dinaikkan lagi hingga pada akhir Maret 1991 menjadi 19% - 21,5% (Tabel 9).

Dampak langsung kenaikan COR SBI terhadap suku bunga deposito dan tingkat suku bunga kredit tercermin dari meningkatnya suku bunga deposito dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan pada saat suku bunga SBI meningkat. Peningkatan COR SBI sejak awal Juni 1990 sampai dengan Maret 1991 mengalami peningkatan dari 3,25% sampai dengan 4,75%, keadaan ini telah meningkatkan suku bunga deposito dengan 7,6% sampai dengan 10,58%, sedangkan tingkat suku bunga kredit naik dengan 5,11% sampai dengan 7,18% pada periode yang sama.

Tingginya suku bunga riil dalam negeri tersebut telah mendorong peningkatan pinjaman swasta komersial luar negeri dalam jumlah besar yang kemudian diswapkan ke Bank Indonesia. Hasil pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai ekspansi kredit perbankan yang sedang giat-giatnya melakukan

ekspansi pasar dalam situasi persaingan yang semakin ketat. Meskipun suku bunga tinggi, permintaan kredit masih cukup tinggi karena ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi sehingga menimbulkan ekspansi yang berlebihan. Ketidaksamaan jangka waktu pinjaman komersial luar negeri dengan penggunaannya di dalam negeri dapat mengganggu cadangan devisa serta menimbulkan masalah neraca pembayaran.

Selanjutnya untuk mengatasi ekspansi yang berlebihan tersebut dan untuk meningkatkan intensitas pengetatan moneter, pada bulan Maret 1991 pemerintah telah melakukan tindakan yang lebih tegas melalui konversi deposito milik BUMN dalam jumlah besar kepada SBI. Akses perbankan terhadap pinjaman luar negeri dikurangi melalui penurunan batas swap individu, peningkatan premi swap dan penyempurnaan ketentuan posisi devisa neto.

Pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia, peningkatan COR SBI dan konversi dana deposito BUMN tersebut telah mampu mengurangi laju ekspansi moneter dan sekaligus menyebabkan melonjaknya suku bunga deposito dan kredit. Pengurangan laju ekspansi moneter tercermin pada penurunan laju pertumbuhan uang beredar (M1 dan M2). Berkurangnya jumlah uang beredar di masyarakat ternyata mampu menekan minat masyarakat untuk membelanjakan kelebihan uangnya terutama untuk barang-barang yang bersifat konsumtif dan pengeluaran yang bersifat spekulatif.

TMP telah berhasil menekan laju pertumbuhan uang beredar (M1) dari 39,8% pada tahun 1989 menjadi 18,4% pada tahun 1990 dan menjadi 10,6% pada tahun 1991. Sedangkan laju pertumbuhan likuiditas perekonomian (M2) walaupun pada tahun

1990 mencapai 44,2%, yang lebih besar dari tahun 1989 yang mencapai 39,8%, namun pada tahun 1991 berhasil diturunkan kembali menjadi 17% per tahunnya.

Penurunan pertumbuhan jumlah uang beredar tersebut telah mampu menekan laju pertumbuhan permintaan dalam negeri sehingga dapat mengurangi laju inflasi. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat inflasi selama tahun 1991 yang tidak melebihi satu digit yaitu 9,52% setahun dan hingga akhir November 1992 inflasi menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 4,28% (Tabel 10).

Faktor utama penyebab menurunnya jumlah uang beredar adalah ekspansi kredit perbankan yang sangat melambat, yaitu hanya mencapai 16,3% dalam tahun 1991 dibandingkan dengan 53,6% dalam tahun 1990. Melambatnya ekspansi kredit perbankan berkaitan erat dengan beberapa faktor terutama meningkatnya sikap kehati-hatian bank sejalan dengan usaha konsolidasi keuangan bank-bank dalam rangka menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Paket Februari 1991. Ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) telah mendorong bank-bank untuk melakukan usaha konsolidasi guna memperbaiki struktur keuangan, manajemen, strategi dan pola operasionalnya. Sikap kehati-hatian ini cenderung mendorong bank-bank untuk menanamkan dananya dalam surat-surat berharga pasar uang terutama SBI sebagai "safety belt".

Kondisi dunia perbankan yang sedang dalam proses konsolidasi dan sikap menahan diri dari usaha ekspansi perkreditan telah memperbesar momentum usaha penyehatan ekonomi. Hal ini tercermin dari melambatnya laju

pertumbuhan kredit dan likuiditas perekonomian serta tingginya suku bunga kredit. Disamping itu tingkat suku bunga kredit yang tinggi juga mengakibatkan menurunnya gairah investasi yang tercermin dari melambatnya laju pertumbuhan kredit perbankan. Beban bunga kredit yang terlalu tinggi dapat pula memperbesar risiko kemacetan kredit yang dapat memperlemah kondisi perbankan nasional. Dalam situasi perekonomian yang mulai sejuk, pembangunan perekonomian dapat terus dilanjutkan dalam suasana yang lebih stabil. Oleh sebab itu untuk lebih mendukung kelancaran pembangunan tersebut, pemerintah mulai melakukan rehabilitasi dampak TMP melalui pelonggaran likuiditas perekonomian dengan sangat berhati-hati dan secara bertahap.

Pada bulan April 1991, COR SBI diturunkan sehingga menjadi 18% - 21,5% setahun. Disamping itu lelang SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dari berbagai jangka waktu yang semula tidak diadakan, diadakan kembali untuk menambah likuiditas perbankan. Penurunan COR SBI terus berlanjut sehingga pada akhir bulan November 1992 COR SBI menjadi 12,5 - 14% dan COR SBPU menjadi 13,5% - 15,25%. Sedangkan suku bunga pinjaman antar bank sore hari adalah 11,4% pada akhir November 1992. Dengan penurunan COR SBI ini diharapkan perbankan lebih dapat memanfaatkan likuiditasnya untuk disalurkan kepada masyarakat, khususnya pada pemberian kredit usaha yang bersifat produktif.

Perkembangan tingkat suku bunga deposito maupun suku bunga kredit perbankan yang berfluktuasi mengikuti perkembangan tingkat perkembangan COR SBI dan SBPU adalah suatu indikasi bahwa Bank Indonesia berhasil membimbing

perkembangan tingkat suku bunga dengan memanfaatkan mekanisme pasar melalui signal-signal dan manajemen moneter secara tidak langsung (indirect monetary management) dengan memanfaatkan piranti moneter SBI dan SBPU.

Trend penurunan tingkat suku bunga internasional (SIBOR, LIBOR) mempercepat penurunan tingkat suku bunga dalam tahun 1992 dengan sekitar 3%. Pada bulan April 1991 tingkat suku bunga deposito sebesar 23,5% - 26,25%, besarnya suku bunga tersebut terus mengalami penurunan sehingga pada bulan April 1992 menjadi 18,83% - 21,59% dan pada bulan November 1992 turun lagi menjadi 14,92% - 17,12%.

Namun demikian perkembangan tingkat suku bunga kredit dan juga pemberi kredit bank ternyata masih menunjukkan situasi yang kurang mengembirakan, hal ini disebabkan karena sebagian dari perbankan masih merasa perlu menyelesaikan tahap konsolidasi yang berkaitan dengan pengaturan prudensial dan menunggu saat yang baik untuk mulai menurunkan tingkat bunganya, sehingga pada periode Agustus 1991 hingga Agustus 1992 kredit hanya tumbuh sebesar 14,1%, atau turun 2,2% dari pertumbuhan selama tahun 1991.

Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan yang dianggap kendala terhadap lebih kemungkinan cepatnya recovery kegiatan bank dalam menyalurkan kreditnya antara lain adalah masalah konsolidasi bank-bank, masalah kesulitan meningkatkan kredit karena hambatan untuk memenuhi persyaratan 20% KUK, masalah pemeliharaan tingkat suku bunga kredit yang cukup tinggi untuk menutup kerugian karena meningkatnya kredit macet dan kecenderungan bank-bank untuk

menempatkan dananya dalam SBI sebagai safetybelt untuk konsolidasi dan menurunkan risiko pada aktiva.

Walaupun perbankan masih menghadapi beberapa kendala dalam melakukan ekspansi perkerditaannya, namun dengan adanya pelonggaran moneter secara hati-hati dan bertahap di tahun 1992, upaya perbankan untuk mempercepat laju pertumbuhan kreditnya mulai terlihat. Hal ini tercermin dari strategi penyaluran dana perbankan, yang pada periode pertengahan 1990 sampai dengan pertengahan 1992 cenderung ke SBI, sesudah pertengahan 1992 arah strategi perbankan mulai berubah kepada penanam ke dalam kredit. Perubahan arah strategi penanaman dana dari SBI kepada kredit akan membawa dampak pelambatan peningkatan money multiplier yang pada gilirannya akan memperlambat laju pertumbuhan uang beredar. Dalam situasi tersebut dapat diharapkan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan kredit yang semakin pesat di masa yang akan datang.

Dengan didukung oleh perdagangan internasional yang tampak mulai membaik akhir-akhir ini, dimana laju pertumbuhan impor mulai lambat serta laju pertumbuhan ekspor yang semakin pesat, serta laju inflasi yang semakin menurun, dalam situasi demikian dapat diharapkan prospek perekonomian di tahun 1993 akan lebih cerah.

Restrukturisasi Kelembagaan.

Untuk menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) pemerintah telah melakukan serangkaian tindakan deregulasi sejak 1 Juni 1983. Pengalaman penerapan deregulasi yang dilakukan sejak tahun 1983, dan terutama perkembangan moneter dan perbankan selama empat tahun pelaksanaan PAKTO,

implementasi kebijakan moneter dan perbankan, telah mendorong terciptanya mekanisme pasar yang lebih efektif dalam mempertemukan demand dan supply, peranan suku bunga dalam menyeimbangkan (clear) pasar tampak dominan.

Kebijakan moneteer tidak langsung melalui mekanisme pasar dalam bentuk Operasi Pasar Terbuka (OPT) telah berjalan lebih efektif. Signal yang diberikan oleh otoritas moneter baik melalui COR SBI atau penyedotan serta dana kepada dan dari masyarakat oleh Bank Indonesia, telah diikuti oleh perubahan baik berupa penurunan maupun kenaikan suku bunga deposito perbankan, dan pada gilirannya terhadap suku bunga pinjaman.

Salah satu tujuan utama dari serangkaian deregulasi di bidang perbankan adalah menciptakan suatu iklim yang mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat diantara bank-bank untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usahanya. Pakto telah membawa dampak perkembangan yang pesat dalam dunia perbankan. Perkembangan tersebut meliputi jumlah bank dan kantornya, jaringan network dan produk perbankan. Termasuk integrasi antara bank-bank milik Pemerintah yang mendapat status khusus dengan bank-bank milik swasta dan asing kedalam suatu dunia usaha perbankan yang bersaing.

Reaksi dari bank milik Pemerintah agak berbeda dengan reaksi daari bank swasta dalam menghadapi deregulasi. Kedudukan yang biasanya lebih dominan dari bank milik Pemerintah mulai berubah karena kecepatan dari pertumbuhan bank swasta yang didorong oleh deregulasi dengan adanya ijin untuk mendirikan bank baru dengan bebas (free entry)

Untuk memantapkan eksistensi

perbankan Indonesia juga tercermin dari dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru di bidang perbankan pada bulan Februari 1991 dalam rangka peningkatan kesehatan bank-bank. Ketentuan tersebut mencakup kewajiban pemenuhan kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) secara bertahap. Pembatasan rasio pinjaman terhadap dana (loan to deposit ratio/LDR), dan keharusan bank-bank untuk memupuk cadangan penghapusan piutang sesuai dengan penilaian aktiva. Sistem laporan bulanan bank, sebagai salah satu sarana pengawasan dan pembinaan bank-bank, juga disempurnakan agar memberikan gambaran yang lebih akurat dan tepat waktu mengenai keadaan keuangan masing-masing bank. Dengan adanya tindakan-tindakan tersebut, persepsi bank-bank atas keadaan pasar perkreditan mulai berubah dan kelemahan-kelemahan dalam portfolio mulai dirasakan yang pada gilirannya mendorong bank-bank untuk lebih cermat dalam meneliti permohonan kredit.

Ketentuan-ketentuan baru di bidang perbankan tersebut telah pula mendorong bank-bank untuk segera menyelesaikan proses konsolidasinya. Diberlakukannya Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 telah pula memberikan landasan idiil dan operasional yang lebih kukuh bagi perkembangan usaha perbankan dalam masa yang akan datang. Undang-undang ini memberikan lebih banyak keleluasaan dan keluwesan dalam pemilikan maupun operasi bank namun menuntut pula sikap yang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank. Dengan demikian usaha perbankan diharapkan akan dapat berkembang secara lebih sehat dan wajar sehingga memiliki kemampuan yang tangguh untuk menunjang perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Manajemen prudensial telah mulai dihayati dan diterapkan secara luas oleh kalangan perbankan. Dengan perkataan lain, manajemen prudensial telah menjadi bagian dari budaya kerja (corporate culture) perbankan. Bank mulai mengukur kinerja dan kesuksesannya dengan kriteria prudensial dan perasaan bertanggung jawab untuk menjadi bank yang sehat. Sikap ini dimasa yang akan datang akan lebih menjamin efektivitas kebijaksanaan moneter dan tindakan moneter karena perbankan yang sehat dan "prudent" merupakan faktor kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan moneter.

Deregulasi di sektor moneter dan perbankan dikombinasikan dengan kebijakan deregulasi di sektor pasar modal dan lembaga-lembaga keuangan telah mendorong terjadinya berlanjutnya proses "pendalaman keuangan" (financial deepening) dalam ekonomi Indonesia. Financial deepening ini akan terus berkembang dengan cepat. Fenomena ini tidak diragukan lagi akan mendorong kebijaksanaan moneter menjadi kebijaksanaan yang lebih berpengaruh dalam menentukan strategi bisnis dan sekaligus jalur pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang dan suksesnya pembangunan ekonomi.

Dalam pada itu kondisi keuangan global juga mempengaruhi kinerja perbankan Indonesia mengingat praktek perbankan modern tidak lagi mengenal batas-batas negara. Sejauh ini kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter telah melindungi perkembangan perbankan di Indonesia dari pengaruh-pengaruh buruk krisis moneter internasional. Tindakan yang bersifat preventif ini akan lebih berhasil bila sistem perbankan di Indonesia telah mencapai basis yang lebih tinggi dalam tingkat

kesehatannya dari pada keadaan dewasa ini. Dalam kaitan ini, sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 Bank Indonesia sebagai pengawas tunggal perbankan secara konsisten akan terus berusaha agar perkembangan sistem perbankan di Indonesia menuju ke arah sistem perbankan yang sehat dan kuat. Sebagai konsekuensinya, dalam masa transisi bank-bank yang lemah harus mencari sendiri cara penyelesaian yang terbaik untuk memperkuat posisinya berdasarkan situasi dan kompetisi pasar tanpa campur tangan dari Bank Indonesia. Bank-bank yang lemah tersebut boleh mencari pilihan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi masing-masing termasuk meningkatkan modalnya, merger, akuisisi bahkan boleh menghentikan kegiatannya (membubarkan diri) apabila ini merupakan pilihan jalan terbaiknya. Sikap tegas Bank Indonesia dan komitmen untuk mendorong kearah terciptanya sistem perbankan yang sehat dan kuat berdasarkan standar internasional akan menjamin adanya pengakuan internasional terhadap perbankan di Indonesia dalam era globalisasi.

Penutup.

Dalam upaya mencapai sasaran akhir kebijaksanaan moneter, yaitu peningkatan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta keseimbangan neraca pembayaran, otoritas moneter menggunakan piranti-piranti kebijaksanaan moneter dan pemantapan kondisi perbankan melalui jalur mekanisme pasar.

Perkembangan selama pelaksanaan deregulasi telah menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan kemantapan perbankan, walau disana sini masih terdapat beberapa kekuarangan, dapat dicapai

melalui mekanisme pasar apabila dilaksanakan kebijaksanaan moneter dan perbankan yang cermat dan tepat.

Kebijaksanaan stabilisasi moneter boleh dikatakan sudah mulai memahami sifat-sifat dan perilaku sektor moneter. Perbankan telah menemukan jalur

pemantapan usahanya yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa perbankan yang sehat dan kuat serta didukung oleh kebijakan moneter yang aktif dan konsisten, dapat menjadi andalan sebagai penopang pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang.

TABEL 2
JUMLAH KANTOR BANK DI INDONESIA

	1986 Des	1987 Des	1988 Okt	1988 Des	1989 Des	1990 Des	1991 Des	1992 Sep
1. Bank Umum	1.735	1.855	1.928	2.022	2.100	4.472	5.358	5.607
- Bank Pemerintah	952	992	1.028	1.034	1.179	1.320	1.395	1.423
- Bank Umum Swasta Nasional *)	693	773	813	901	1.820	3.034	3.840	4.057
- Bank Asing & Campuran	90	90	87	87	101	118	123	127
2. B P R	5.790	5.783	7.706	7.706	7.770	8.006	8.296	8.441
3. BRI Unit Desa	2.273	2.358	2.566	2.585	2.843	3.040	3.210	3.208
Jumlah Kantor	9.798	9.996	12.200	12.313	13.713	15.518	16.864	17.256

*) Termasuk Bank Pembangunan Daerah

tbl01va

T A B E L 3
PERKEMBANGANDANA DAN KREDIT PERBANKAN
Miliar Rp

	Dana Pihak Ketiga		Kredit	
	Volume	Pertumbuhan (%)	Volume	Pertumbuhan (%)
1972	522,6	0,0	563	38,7
1973	756,5	44,8	905	60,7
1974	1.189,5	57,2	1.342	48,3
1975	1.543,7	29,8	1.857	38,4
1976	2.081,2	34,8	2.354	26,8
1977	2.412,8	15,9	2.708	15,0
1978	3.023,8	25,3	3.459	27,7
1979	4.243,6	40,3	4.105	18,7
1980	6.410,9	51,1	5.426	32,2
1981	8.009,1	24,9	7.510	38,4
1982	8.867,3	10,7	10.251	36,5
1983	12.396,5	39,8	12.943	26,3
1984	15.498,2	25,0	17.943	38,6
1985	20.174,4	30,2	21.193	18,1
1986	23.510,9	16,5	25.258	19,2
1987	29.330,8	24,8	31.505	24,7
1988	37.509,7	27,9	42.454	34,8
1989	54.375,2	45,0	62.910	48,2
1990	83.154,3	52,9	96.978	54,2
1991	95.118,3	14,4	112.825	16,3
Okt'92	112.767,8	21,9	123.146	14,2

ind2

TABEL 4
PERKEMBANGAN DANA MASYARAKAT
(RUPIAH DAN VALAS)

(Dalam miliar Rp)

Tahun/ Bulan	Giro	Δ %	Deposito	Δ %	Tabungan	Δ %	Jumlah	Δ %
1988	10.350	17,67	24.986	32,15	2.174	34,03	37.510	27,89
1989	15.150	46,38	34.013	36,13	5.213	139,79	54.376	44,96
1990	19.254	27,09	54.239	59,47	9.662	85,34	83.155	52,93
1991	22.013	14,33	57.552	6,11	15.553	60,97	95.118	14,39
Okt'92	23.900	12,45	65.623	14,35	23.245	68,05	112.768	21,95

tb01dn

TABEL 5
UANG BEREDAR DAN KREDIT

(Dalam milyar Rp)

Tahun	Uang Beredar (M1)	% Perubahan	Uang Beredar (M2)	% Perubahan	Kredit *)	% Perubahan
1968	113,9		120,5		126,0	
1969	183,8	61,4	233,3	93,6	243,0	92,9
1970	250,3	36,2	330,4	41,6	361,0	48,6
1971	320,7	28,1	468,8	41,9	501,0	38,5
1972	474,6	48,0	694,9	48,2	679,0	35,5
1973	668,9	40,9	987,4	42,1	1.058,0	55,5
1974	937,5	40,2	1.452,2	47,1	1.573,0	48,7
1975	1.250,0	33,3	1.978,1	36,2	2.751,0	74,9
1976	1.602,9	28,2	2.631,2	33,0	3.566,0	29,6
1977	2.006,3	25,2	3.131,1	19,0	3.937,0	10,4
1978	2.488,3	24,0	3.808,8	21,6	5.394,0	37,0
1979	3.384,6	36,0	5.221,6	37,1	5.268,0	(2,3)
1980	4.995,0	47,6	7.690,5	47,3	7.880,0	49,6
1981	6.485,5	29,8	9.716,1	26,3	10.159,0	28,9
1982	7.171,4	10,6	11.875,4	22,2	13.022,0	28,2
1983	7.569,0	5,5	14.663,0	23,5	15.299,0	17,5
1984	8.581,0	13,4	17.937,0	22,3	18.813,0	23,0
1985	10.104,0	17,7	23.153,0	29,1	22.157,0	17,8
1986	11.678,0	15,6	27.661,0	19,5	26.402,0	19,2
1987	12.685,0	8,6	33.885,0	22,5	32.852,0	24,4
1988	14.392,0	13,5	41.998,0	23,9	44.001,0	33,9
1989	20.114,0	39,8	58.705,0	39,8	63.606,0	44,6
1990	23.819,0	18,4	84.630,0	44,2	97.696,0	53,6
1991	26.342,0	10,6	99.059,0	17,0	113.608,0	16,3
Okt 1992	27.880,0	10,8	116.238,0	21,7	123.925,0	14,1

tbubkr1

*) termasuk kredit dari Bank Indonesia

T A B E L 6
PERANAN PERBANKAN TERHADAP
TOTAL DANA PIHAK KETIGA
(RUPIAH DAN VALAS)

B A N K	1985	1988	1989	1990	1991	1992*)
	%	%	%	%	%	%
	to Total	to Total	to Total	to Total	to Total	to Total
1. Bank Pemerintah	64.0	60.1	54.7	48.9	44.0	45.6
2. Bank Swasta Nasional	22.6	29.8	36.1	40.8	45.4	44.4
3. Bank Pembangunan Daerah	4.1	3.5	3.1	3.1	3.4	3.1
4. Bank Asing & Campuran	9.3	6.7	6.1	7.2	7.2	7.0
5. Total	100.0	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0

1b021va

*) Per Agustus

T A B E L 7
PERANAN PERBANKAN TERHADAP PERKREDITAN
(RUPIAH DAN VALAS)

B A N K	1978	1983	1988	1989	1990	1991	1992*)
	%	%	%	%	%	%	%
1. Bank Pemerintah	81.9	75.6	67.4	62.9	55.2	53.1	54.1
2. Bank Swasta Nasional	8.6	14.5	25.2	29.6	36.1	37.1	35.8
3. Bank Pembangunan Daerah	1.9	3.2	2.8	2.6	2.4	2.3	2.4
4. Bank Asing 1)	7.6	6.7	4.8	4.9	6.3	7.5	7.7
5. Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1b031kr

1) Termasuk Bank Campuran

**PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK
1988 - 1992**

Tahun/Bulan	Perdagangan Saham (juta lembar)	Nilai transaksi (juta Rp)	IHSG Akhir Bulan
<u>1988</u>	<u>6.938</u>	<u>30.587</u>	<u>305.120</u>
<u>1989</u>	<u>96.063</u>	<u>990.356</u>	
Januari	2.781	18.382	298.060
Februari	5.737	38.518	307.340
Maret	4.226	30.351	335.537
April	2.524	16.551	295.954
Mei	2.414	15.397	295.020
Juni	3.022	21.400	302.704
Juli	3.750	24.981	320.739
Agustus	18.409	189.923	475.673
September	11.782	159.029	448.666
Oktober	8.279	107.547	441.649
November	14.275	170.801	401.928
Desember	18.864	199.476	399.687
<u>1990</u>	<u>701.787</u>	<u>7.300.626</u>	
Januari	44.968	497.355	441.805
Februari	35.897	401.180	504.267
Maret	66.192	792.792	612.200
April	53.822	763.890	638.790
Mei	76.105	900.406	636.401
Juni	59.163	692.138	624.326
Juli	72.444	848.577	614.406
Agustus	56.171	592.829	558.337
September	55.012	494.844	468.509
Oktober	65.894	501.851	416.489
November	31.183	231.769	382.203
Desember	84.936	582.995	417.788
<u>1991</u>	<u>1.005.221</u>	<u>5.767.865</u>	
Januari	48.170	316.418	383.018
Februari	80.608	638.958	391.330
Maret	62.599	478.245	408.110
April	75.446	603.260	413.713
Mei	73.899	530.794	397.600
Juni	67.248	510.127	346.268
Juli	118.704	665.848	339.958
Agustus	71.115	374.656	300.980
September	79.622	327.127	249.187
Oktober	84.465	349.623	228.864
November	97.465	357.454	241.318
Desember	147.880	615.555	247.390
<u>1992</u>	<u>1.671.671</u>	<u>7.303.692</u>	
Januari	157.856	635.371	282.200
Februari	193.996	790.953	280.900
Maret	114.288	527.758	278.600
April	109.689	496.312	277.200
Mei	145.576	685.724	299.200
Juni	199.138	996.539	313.600
Juli	112.690	572.798	317.200
Agustus	194.608	607.068	301.270
September	89.858	421.833	298.392
Oktober	78.929	358.910	307.577
November	277.243	1.210.426	285.604

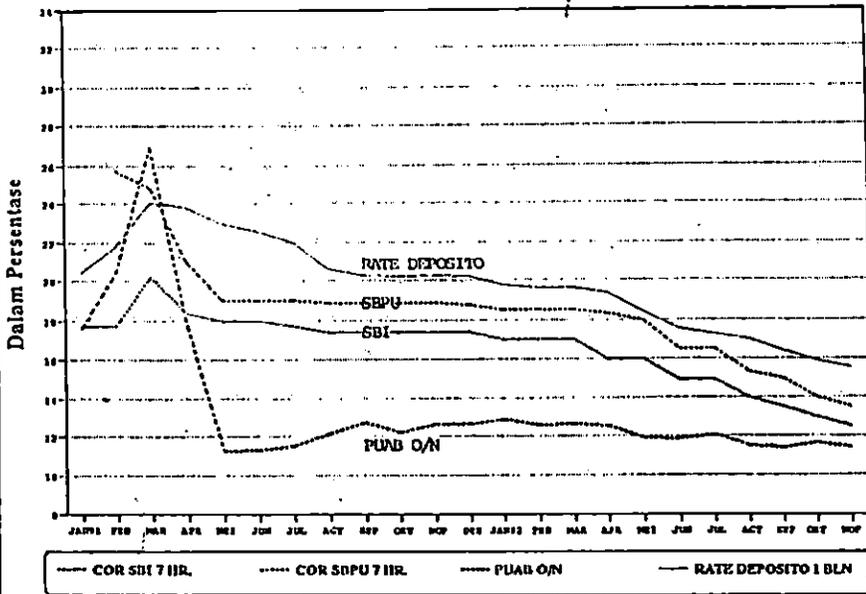
TABEL 10
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN LAJU INFLASI 1)

Pertumb. Laju TAHUN Ekonomi Inflasi (%) (%)	Laju TAHUN Inflasi (%)	Pertumb. Laju TAHUN Ekonomi Inflasi (%) (%)	Laju TAHUN Inflasi (%)
1950	-	1981	7,9
1951	73,42	1982	2,3
1952	-9,95	1983	4,2
1953	10,97	1984	7,0
1954	6	1985	2,5
1955	33,02	1986	5,9
1956	14,18	1987	4,9
1957	9,94	1988	5,8
1958	45,76	1989	7,5
1959	22,22	1990	7,1
1960	37,66	1991	6,6
1961	5,7	1992 2)	n.a
1962	1,8		
1963	-2,2		
1964	3,5		
1965	1,1		
1966	2,8		
1967	1,4		
1968	10,9		
1969	6,8	1969/70	10,7
1970	7,5	1970/71	7,78
1971	7,0	1971/72	0,81
1972	9,4	1972/73	20,8
1973	11,3	1973/74	47,4
1974	7,6	1974/75	20,1
1975	5,0	1975/76	19,8
1976	6,9	1976/77	12,1
1977	8,8	1977/78	10,1
1978	7,8	1978/79	11,8
1979	6,3	1979/80	19,1
1980	9,9	1980/81	15,9
		1981/82	9,80
		1982/83	8,40
		1983/84	12,63
		1984/85	3,64
		1985/86	4,13
		1986/87	7,30
		1987/88	7,37
		1988/89	6,55
		1989/90	5,48
		1990/91	9,11
		1991/92	9,78
		1992/93 2)	2,93

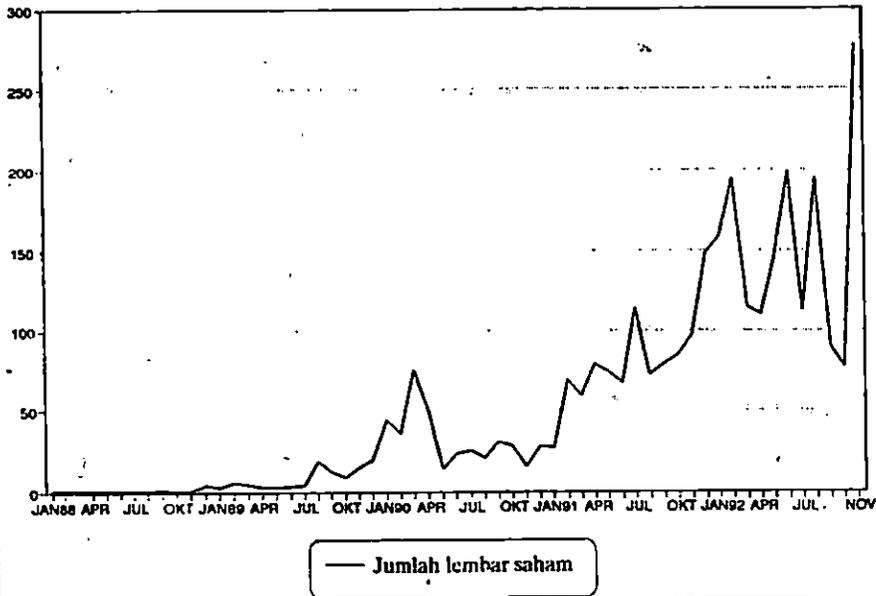
Catatan :

- 1) - Tahun 1951 s.d. 1958 dihitung dari perkembangan harga 19 bahan makanan di Jakarta, dengan cara point to point.
 - Tahun 1959 s.d. Maret 1979 dihitung dari perkembangan harga 62 macam barang dan jasa (Indeks Biaya Hidup) di Jakarta, dengan cara point to point.
 - Mulai April 1979 digunakan perkembangan Indeks Harga Konsumen gabungan 17 kota, dengan cara kumulatif.
 - Mulai April 1990 digunakan perkembangan Indeks Harga Konsumen gabungan 27 kota, dengan cara kumulatif.
- 2) - S.d. November 1992
(ekoflas.wk1)

**COR SBI/SBPU, PUAB O/N, DEPOSITO
JAN.1991 s.d. NOPEMBER 1992 (Bulanan)**

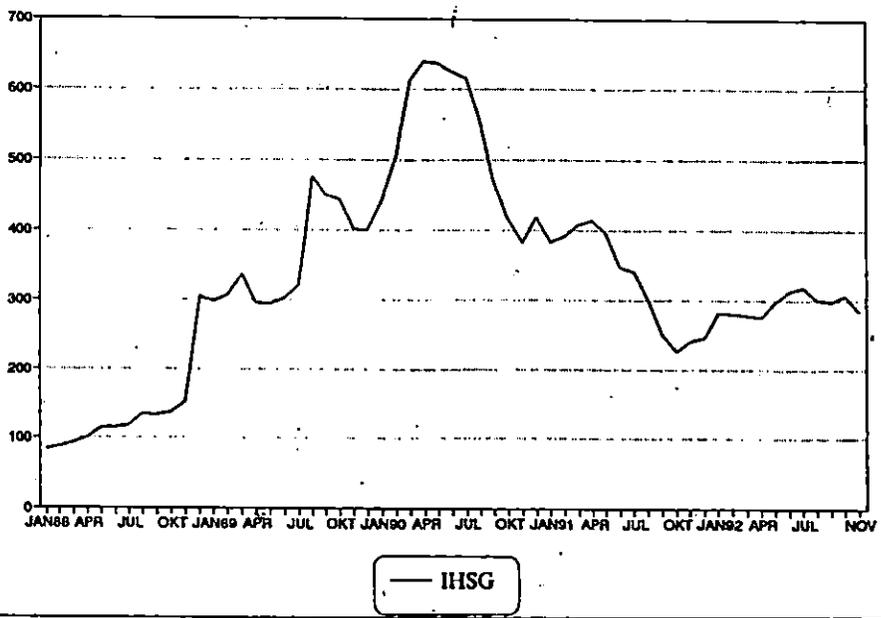


**PERDAGANGAN SAHAM
Januari 1988 s.d. November 1992**



INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

Januari 1988 s.d. November 1992



LAJU INFLASI

1988 s.d. November 1992 (Bulanan)

